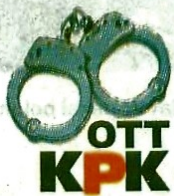




Tuntut Haryadi Dimiskinkan, Kalau Bisa Hukum Mati

PERISTIWA lima tahun itu masih hangat dalam pikiran Minarni Ester Diana. Saat rekannya sesama pencari nafkah di Pasar Kembang (Sarkem) Jogja, mengalami darah tinggi, lalu mati.



Perempuan 70 tahun ini mengenakan baju kuning dan rok warna hitam. Dia turut duduk depan, menghadap sebagai pemateri di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kemarin (9/6).

Akrab disapa Ester, dia merupakan sosok yang berani dengan lantang menyuarakan keinginan para pengais nafkah di Sarkem, Sosrowijayan, Gedongtengen, Kota Jogja.

Ester terkenal, mulai masuk ke Sarkem sekitar tahun 1980. Awalnya dia menyewa kios di sana. Kemudian setahun berjalan sebagai tukang jahit, dia memutuskan untuk membeli kios yang ditempatinya dengan harga Rp 200 ribu di tahun 1981. ▶ *Baca Tuntut... Hal 7*



Itu kalau HS tidak bisa bertanggung jawab, tuntutan kami cuma dia harus dimiskinkan dan dihukum mati.”

MINARNI ESTER DIANA



FOTO-FOTO: SITI FATIMAH/RADAR JOGJA

SUARA MARGINAL: Minarni Ester Diana, pengais nafkah di Sarkem saat menyuarakan keinginannya di LBH Jogja, kemarin (9/6).

Tuntut Haryadi Dimiskinkan, Kalau Bisa Hukum Mati

Sambungan dari hal 1

"Ada kwitansi jual beli. Tiap hari bayar karcis dan PBB ditarik" bebernyanya kepada awak media.

Tapi tiba-tiba lapaknya terkena gusur pada 2017. Penggusuran ini dinilai janggal. Sebab terbitnya peraturan wali kota tentang penggusuran, memiliki tanggal yang sama dengan aksi penggusuran. Saat itu, Wali Kota Jogja dijabat Haryadi Suyuti. "Tanpa relokasi dan ganti rugi apa pun," ujar Ester liris.

Praktis Ester kehilangan pasar dan langganan. Sebab, rumahnya berlokasi cukup jauh dari Sarkem, yaitu di Godean, Sleman. Bahkan jarak tempuhnya sekitar satu jam. "Penghasilan saat ini buka jahit di rumah. Sejak digusur, menjahit di rumah," ucapnya.

Ester mengaku masih beruntung. Amarah yang berkecamuk dalam dadanya kini justru berubah jadi semangat. Untuk memperjuangkan haknya dan rekan-rekan sejawatnya yang pernah mencari nafkah di Sarkem. "Beberapa orang meninggal, karena tensinya naik. Ada Pak Jon, Pak Samino, Bu Sa-

bar, Mbak Tuti," sebutnya.

Dengan suara yang sudah bergetar, Ester menyatakan keinginannya. Dia berharap untuk mendapat kios baru. Supaya dirinya dan rekan-rekannya mampu menghidupi keluarga. Dia pun meminta nama Jalan Pasar Kembangangan dihapus. Tapi dilestarikan sebagai pasar tradisional. "Itu kalau HS tidak bisa bertanggung jawab, tuntutan kami cuma dia harus dimiskinkan dan dihukum mati," lontarnya, disambut tepuk tangan mereka yang hadir di LBH Jogja.

Direktur LBH Jogja Julian Duwi Prasetya mengaitkan aduan Ester dengan tertangkapnya HS dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai masyarakat sipil, dia mendukung lembaga antirasuah itu untuk mengungkap semua kasus korupsi yang dilakukan HS. Utamanya terkait perizinan apartemen dan hotel. "Kami mengimbau korban kebijakan HS untuk bersuara dan menuntut pemerintah memenuhi hak rehabilitasi dan restitusi terhadap korban," ujarnya.

Julian juga mengajak masyarakat sipil untuk mengawal kasus OTT HS, guna memastikan HS dihukum seberat-beratnya. Seperti Ester, yang mengharapkan pemiskinan dan hukuman mati bagi HS. "Kalau berbicara dampak, hukuman mati, (dapat diterapkan jika, *Red*) dia melakukan korupsi saat terjadi bencana. Tapi minimal, kami berharap KPK berani menuntut seberat-beratnya. Seumur hidup atau apa. Kami ingin rasa adil dari korban bisa dipenuhi," desaknya.

Julian juga berharap, upaya yang dilakukannya dapat jadi alarm bagi pemerintah, untuk tidak berlaku sewenang-wenang. "Tapi saat ini mereka masih belum sadar. Kami berharap, tindakan KPK bisa memberikan efek cukup bagi pemimpin," serunya.

OTT terhadap HS diharap dapat membuka penceramatan potensi kasus korupsi lainnya, secara luas di DIJ. "Karena masifnya politik kebijakan pembangunan, dalam kawasan strategis pariwisata nasional. Sehingga pembangunan dan izin akan semakin menjamur," tandasnya. (**fat/laz/fj**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005